

STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PELAKU KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN BANTUL

Oleh

Rosdiana Sugeha¹⁾, Achmad Nurmandi²⁾, Suswanta³⁾

^{1,2,3}Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹E-mail: dianasugeha@yahoo.com

²E-mail: nurmadiachmad@gmail.com

³E-mail: soes_ummy@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana strategi pengembangan sumber daya manusia pelaku kepariwisataan di Kabupaten Bantul yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan software Nvivo12 plus. strategi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pelaku Pariwisata antara lain bisa kita fokuskan pada. Pertama, Peningkatan SDM pelaku Wisata, dengan memberikan tenaga kerja yang bekerja pada Hotel Melati, Pondok Wisata, Restaurant atau Rumah Makan dan usaha jasa lainnya pelatihan, seperti pelatihan; Bimbingan Teknis Guide, Bimbingan Teknis Food Product dan Bimbingan Teknis Room Devision. Kedua, Peningkatan Aparatur Pariwisata, dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan berupa; Diklat Pimpinan Tik II, Diklat Teknis Manajemen Perkantoran, Diklat Teknis Manajemen kearsipan, Diklat Teknis Pariwisata, Diklat Teknis Perizinan, Diklat Bahasa Inggris. Ketiga, Pemberdayaan Masyarakat, dengan memberikan Penyuluhan berupa; Penyuluhan dan Bimbingan Kelompok Sadar Wisata. Strategi Dispar Kabupaten Bantul dalam meningkatkan Kualitas SDM pelaku kepariwisataan tentunya telah berhasil dilaksanakan, melihat dampak dari upaya tersebut menyebabkan Jumlah Kunjungan Wisatawan yang meningkat setiap tahunnya.

Kata Kunci; *Strategi, Pariwisata, Sumber Daya Manusia*

1. PENDAHULUAN

Berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggal. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman atau untuk belajar (Gamal, 2004:3). Sedangkan pariwisata dalam Undang- Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009, dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, pariwisata dalam Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antara bangsa. Dengan adanya kunjungan wisatawan baik wisatawan manca negara maupun wisatawan lokal akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan pendapatan daerah tujuan wisatawan.

Pariwisata menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi karena kegiatannya mendorong perkembangan beberapa sektor ekonomi nasional dengan mengunggah industri-industri baru yang berkaitan dengan jasa-jasa wisata misalnya;

usaha-usaha transportasi, akomodasi (hotel, motel, pondok wisata, perkemahan, dan lain-lain), yang memerlukan perluasan beberapa industri seperti peralatan hotel dan kerajinan tangan (Wahab, 2003:9) Dalam kerangka optimalisasi manfaat pengembangan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah sekitar wisata diadopsi sebagai suatu strategi pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang diimplementasikan dalam kerangka *design* dengan pusat dan sasarannya tidak hanya menumbuh kembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah yang bersifat sosial dan budaya. Kabupaten Bantul merupakan kabupaten yang merupakan tingkat perkembangan pariwisatanya cukup tinggi jika di bandingkan dengan beberapa kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Total perkembangan pariwisata pada Kabupaten Bantul Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar
Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Bantul



Adanya sektor pariwisata sangatlah mendukung adanya pembukaan lapangan usaha, yang juga menjadi penggerak pemasukan Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Bantul, seperti perdagangan, restoran, souvenir, homestay dan hotel. Pengembangan SDM pada pelaku kepariwisataan di Kabupaten Bantul terutama diarahkan pada penguasaan kompetensi dibidangnya sehingga mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas di bidang kepariwisataan. Tenaga kerja yang berkompeten yang dihasilkan ini akan mampu menarik wisatawan asing sehingga pariwisata di Kabupaten Bantul mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Tidak hanya kepada SDM, namun permasalahan juga terjadi kepada penurunan jumlah pengunjung pariwisata tercatat di pengaruhi oleh beberapa aspek yaitu dari aspek sarana dan prasarana maupun aspek penyedia jasa. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mencatat 237.170 wisatawan datang ke objek wisata di Bumi Projo Tamansari. Akan tetapi ada penurunan kunjungan di Kecamatan Dlingo. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Kwintarto Heru Prabowo mengatakan, selama masa liburan, Dinas menargetkan 269 ribu wisatawan mengunjungi tempat wisata Pantai di Bantul. Melihat data kunjungan wisata berertibusi dari bulan juni hingga agustus 2019 tercatat sudah 237.170 wisatawan yang datang ke Bantul.

Jumlah kunjungan terdiri dari 173.200 wisatawan ke kawasan Pantai Parangtritis, 61.086 orang ke kawasan Pantai Samas dan 2.984 orang yang berkunjung ke Goa Selarong dan Goa Cerme. Sedangkan untuk pendapatan dari sektor wisata selama masa liburan ini mencapai miliaran rupiah. Untuk pendapatan dari sektor wisata, terhitung sampai bulan september 2019 sudah mencapai sekitar Rp 2,2 miliar. Namun, di balik jumlah kunjungan yang hampir mencapai target, ada penurunan kunjungan di objek-objek wisata Kecamatan Dlingo. Menurutnya, penurunan kunjungan wisata itu karena banyak bus besar yang tidak bisa melintas di jalur-jalur yang secara standarisasi belum bisa di lewati oleh bus-bus besar. Penurunan (kunjungan wisata) cukup banyak terjadi di kawasan Dlingo.

Masalah selanjutnya adalah jalur Patuk-Dlingo merupakan jalur yang disiapkan Pemkab Bantul untuk bus besar yang hendak menuju objek wisata di Kecamatan Dlingo. Namun dalam realisasinya, jalur tersebut tidak bisa dimaksimalkan karena pemasangan road barrier di tengah-tengah jalur. Sehingga, ke depannya Dinas Bantul akan berkoordinasi dengan Pemkab Gunungkidul. Di mana tujuannya mencari solusi terkait penyelesaian masalah tersebut. Sehingga akan menemukan suatu solusi untuk kembali meningkatkan pengunjung wisatawan pada Kabupaten Bantul (travel.detik.com) Oleh karena itu, besar harapannya bahwa wisata di kabupaten bantul menjadi objek wisata yang sangat di minati oleh para wisatawan nasional maupun wisatawan asing. Untuk Mendukung Visi yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. Serta ditetapkan dalam

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul yaitu : “Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah “ Bantul Menjadi Destinasi Pariwisata Utama Indonesia Yang Bernuansa Harmoni Alam dan Budaya Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Serta dalam mendukung visi tersebut harus melalui proses yang dituangkan dalam Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai berikut:

- Mengembangkan destinasi pariwisata alam, budaya, dan minat khusus yang bernuansa lingkungan, berkelanjutan, dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat;
- Mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, bertanggung jawab, dan berskala luas untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dengan mengikuti perkembangan teknologi;
- Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
- Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan sumber daya manusia yang efektif, efisien, dan mewujudkan masyarakat sadar wisata.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut diperlukan berbagai keahlian, baik keahlian manajerial maupun keahlian/keterampilan teknis, serta kemampuan dan kemauan kepemimpinan yang berorientasi mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara. Untuk dapat mengatasi dan menghindari implikasi tersebut. Maka, untuk itu Dinas Kabupaten Bantul juga mengambil peranan penting sebagai unsur pelaksana pemerintah di bidang pariwisata dan di dalam peningkatan kualitas SDM Dinas pariwisata Kabupaten Bantul harus lebih fokus kepada peningkatan SDM dalam hal ini adalah pelaku-pelaku pada bidang kepariwisataan di Kabupaten Bantul. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana : “Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Kepariwisata Di Kabupaten Bantul”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam katagori penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif (penggambaran) yang berupa fakta – fakta tertulis maupun lisan dari setiap perilaku orang – orang yang di cermati. Penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Rakhmat, 2000: 24). Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan software Nvivo12 plus.

Analisis Nvivo 12 plus pada penelitian ini menggunakan fitur cluster analysis (Bruno,2019) cluster analysis digunakan untuk menfuisualisasikan dan mengumpulkan data/words yang memiliki kesamaan dan perbedaan.penelitian ini melihat

persamaan dan perbedaan twit account kelompok organisasi. Menurut nurmandi, (Nurmandi, Qodir, & Hasse, 2019) group analysis untuk menemukan item yang berkaitan dengan item yang lain, hubungan item tergantung pada pengkodean item, penggunaan fitur group analysis untuk mencari hubungan dengan item atau node yang lain.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, yang beralamat di Komplek Perkantoran II Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Bantul 55714
Telepon: 0274-6460222 E-mail: dinas.pariwisata@bantulkab.go.id,

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

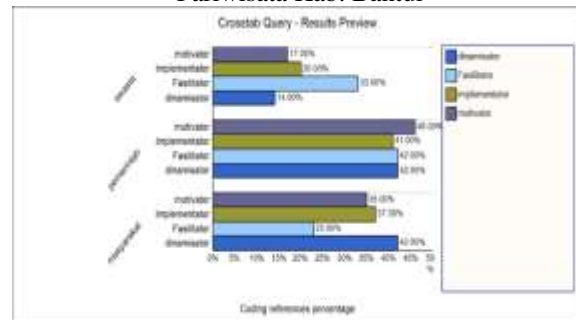
Kabupaten Bantul atau yang lebih dikenal dengan nama *projetamansari* dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah, juga harus profesional dalam arti kata penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli dibidangnya masing-masing. Tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerjanya dihadapkan dengan efisien penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan. Saat ini Kabupaten Bantul juga mempunyai pusat pemerintahan, perdagangan, dan berkembangnya seni budaya khususnya tradisi Jawa. Dari segi obyek dan daya tarik wisata seperti: bangunan situs bersejarah, atraksi/event seni budaya tradisional, sekolah/pendidikan kesenian Jawa, makanan khas, pusat perbelanjaan, gudangnya budayawan/seniman, keramahtamahan masyarakatnya serta beberapa faktor lain telah menjadi "*trademark*" yang tidak dimiliki Kota/Kabupaten lain khususnya di Jawa Tengah telah menempatkan posisi sebagai salah satu Kota Tujuan Wisata yang memiliki prospek untuk dikembangkan.

Strategi Optimalisasi Kinerja Sumberdaya Manusia Bidang Pariwisata.

Pengembangan pariwisata membutuhkan kinerja yang baik dari Pemerintah. Kinerja yang baik dapat diukur melalui produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, serta tanggung jawab Dinas Pariwisata dalam pelayanannya kepada masyarakat. Kinerja yang baik juga sangat penting untuk pengelolaan/pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan sumberdaya manusia bidang pariwisata. Hal-hal tersebut merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dalam mewujudkan visinya.

Berikut analisis strategi optimalisasi SDM bidang pariwisata di Kabupaten Bantul :

Gambar
Grafik Analisis Strategi Optimalisasi SDM Bidang Pariwisata Kab. Bantul

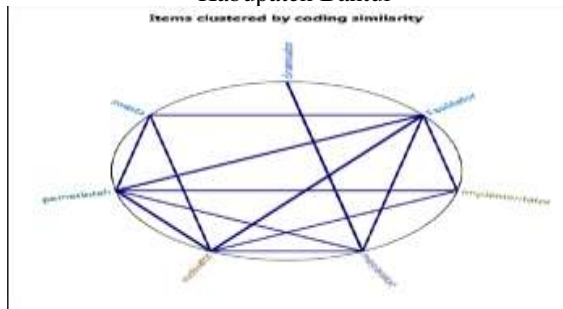


Sumber : Analisis Melalui Aplikasi Nvivo12 dengan Fitur Crosstab Query Rate(%)

Dari data diatas menunjukkan bahwa dalam pengembangan atau optimalisasi SDM bidang pariwisata di Kabupaten Bantul, Pemerintah yang masih dominan dalam optimalisasi sumber daya manusia yaitu rata-rata persentase yang didapatkan sebesar 42%. hal tersebut disebabkan karena pemerintah intens dalam memberikan pelatihan tentang pariwisata kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Bantul. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berperan sangat baik sebagai motivator, implementator, fasilitator, dan dinamisor dalam pengembangan SDM bidang pariwisata Bantul. Kemudian dipihak masyarakat dalam indikator dinamisor yang paling tinggi yaitu 42% hal ini disebabkan oleh antusiasme masyarakat yang sangat tinggi dalam berpartisipasi untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul, hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya jumlah wisatawan yang berkunjung pada saat libur natal dan tahun baru (NATARU) serta adanya program pagelaran festival dari pemerintah yang didukung oleh masyarakat sehingga minat wisatawan meningkat 10% dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya dari pihak swasta mempunyai persentase yang rendah dibanding semua pihak yang berperan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul. Pihak swasta bahkan hanya mendapatkan nilai 14% pada indikator Dinamisor, hal tersebut disebabkan pihak swasta kurang memperhatikan aturan dan arahan dari pemerintah pada saat pelatihan dan sosialisasi pariwisata, sehingga tak jarang ditemukan pihak swasta yang melanggar aturan serta banyaknya keluhan masyarakat tentang fasilitas pariwisata yang buruk dari pihak swasta. Sehingga dalam pengembangan SDM bidang pariwisata Kabupaten Bantul, pihak swasta harus lebih kooperatif dan ikut aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada saat pelatihan pengembangan sumber daya manusia.

Gambar
Cluster Analisis Optimalisasi Pengembangan SDM
Kabupaten Bantul



Sumber : Analisis melalui nvivo12 dengan fitur *Culster Analisis*

Dari data diatas menunjukkan bahwa dalam pengembangan atau optimalisasi SDM bidang pariwisata di Kabupate Bantul, Pemerintah yang masih dominan dalam optimalisasi sumber daya manusia Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berperan sangat baik sebagai motivator, implementator, fasilitator, dan dinamisator dalam pengembangan SDM bidang pariwisata Bantul. Kemudian dipihak masyarakat dalam indikator dinamisator paling dominan keterkaitannya. Kemudian masyarakat dalam pengembangan SDM tidak mempunyai hubungan terhadap implementator hal tersebut dikarenakan dalam setiap pelatihan masyarakat hanya sebagai peserta dan pelaku wisata. Selanjutnya dari pihak swasta mempunyai peran yang rendah dibanding semua pihak yang berperan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul. Data tersebut menunjukkan swasta hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam pengembangan SDM.

Strategi optimalisasi kinerja sumberdaya manusia bidang pariwisata juga didukung dengan adanya kebijakan, baik secara internal maupun eksternal.

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, yaitu Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian. Kebijakan tersebut meliputi:

- Meningkatkan kinerja organisasi dan aparatur.
- Meningkatkan disiplin kerja, efisiensi waktu kerja dan efektivitas pencapaian target pekerjaan.
- Meningkatkan koordinasi antar sub dinas, bagian, dan seksi.
- Mendorong motivasi kerja karyawan, antara lain melalui penyusunan job description, sandar kinerja, dan job enrichment, yang diimbangi dengan pola pemberian reward and punishment secara proporsional.
- Memberikan ruang yang lebih besar untuk menampung persoalan-persoalan yang timbul guna menjamin kelancaran komunikasi dua arah.
- Meningkatkan pelayanan kepegawaian
- Meningkatkan kesejahteraan aparatur

2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat, terdiri dari:

- a. Peningkatan Pembinaan Seni dan Budaya, meliputi:
 - Meningkatkan bantuan dan pembinaan terhadap sanggar/ paguyuban/ kelompok/ organisasi seni dan budaya
 - Meningkatkan event serta atraksi seni dan budaya
 - Meningkatkan penyelenggaraan pagelaran/pentas kesenian rakyat dan tradisional
 - Menggali potensi seni dan budaya yang ada dan berkembang di masyarakat
 - Membantu pengembangan seni dan budaya masyarakat yang ada di kelurahan-kelurahan
- b. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataaan
 - Meningkatkan pelayanan dalam bidang perizinan usaha jasa pariwisata
 - Meningkatkan pembinaan terhadap para pelaku pariwisata dan masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan
 - Meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan-peraturanyang berkaitan dengan kepariwisataan
 - Meningkatkan pembinaan dan pemantapan terhadap Pokdarwis yang ada di kelurahan-kelurahan

Rencana Pengembangan SDM Pelaku Pariwisata

Ada beberapa strategi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pelaku Pariwisata antara lain bisa kita fokukan pada :

1) Pelatihan Kepemanduan Secara Intensif

Tim pemandu wisata yang merupakan warga sekitar tempat pariwisata mendapat ilmu penggunaan dan pelatihan secara langsung di lapangan oleh Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Dalam meningkatkan kompetensi maka perlu diadakan pelatihan untuk menambah skill dan kualitas setiap pemandu. Pelatihan tersebut bisa dilaksanakan low season pengunjung yang hadir atau waktu malam. Adapun bentuk pelatihan bagaimana membaca cuaca, hal tersebut bertujuan agar setiap pemandu lebih peka terhadap cuaca dan untuk meminimalisir resiko kecelakaan.

2) Pelatihan Bahasa Asing

Wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Kabupaten Bantul tidak hanya wisatawan domestik dan lokal. Banyak juga wisatawan manca negara terutama ketika musim panas di negara eropa. Pelatihan bahasa asing, terutama bahasa Inggris sangat penting bagi setiap pemandu. Karena pemandu akan menjalin komunikasi dengan para wisatawan yang datang ke obyek wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bantul. Maka pelatihan berbahasa asing lebih ditekankan pada kemampuan berbicara atau percakapan. Pelatihan tersebut harus dilakukan secara rutin dengan memberikan buku-buku penunjang bagi pemandu untuk berlatih.

3) Pengembangan Pengelolaan Homestay

Untuk menambah lama tinggal wisatawan yang datang, perlu adanya pembuatan ecolodge di beberapa rumah warga yang ingin menyediakan jasa penginapan bagi wisatawan. Mendirikan ecolodge menjadi alternatif untuk menambah pendapatan masyarakat lokal dan menambah lama tinggal wisatawan sehingga mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Maka pelatihan dibidang pengelolaan homestay/ecolodge, terutama bagaimana mengelola, menciptakan penginapan yang layak untuk wisatawan. Tetapi pengelolaan penginapan tersebut disesuaikan dengan budaya setempat dan ramah lingkungan.

4) Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kabupaten Bantul terkenal akan keunikan kulinernya seperti, tiwul, gatot, krecek telo yang terbuat dari ketela pohon atau ubi kayu, dan nasi merah yang dapat dipesan dengan menggunakan lauk sayur lombok hijau, daging sapi, iso babat, atau ikad wader sesuai dengan selera. Maka dengan melihat potensi kulinernya dan bahan untuk dijadikan ole-ole dan bisa juga masyarakat membuat souvenir. Tapi hasil pengamatan di obyek wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bantul tidak terdapat atau ditemukan ole-ole dan souvenir khas masing-masing dari obyek wisata tersebut. Maka masyarakat lokal harus dilatih untuk menumbuhkan usaha masyarakat lokal. Maka peran pemerintah selaku stakeholder sangat penting dalam menyediakan tenaga untuk pelatihan kegiatan tersebut.

Peran Fasilitator, Dinamisor, Motivator dan Implementor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Peran yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selain sebagai motivator adalah sebagai dinamisor, fasilitator, dan implementor. Peran-peran tersebut direalisasikan dengan berbagai program demi tercapainya pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism). Di era pembangunan saat ini masyarakat menjadi sorotan utama dalam segala aspek pembangunan termasuk bidang pariwisata. Maka terwujudnya pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism) merupakan harapan seluruh elemen baik itu pemerintah maupun masyarakat demi menciptakan kesejahteraan bersama.

Secara garis besar peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah melakukan tugas pemerintah dengan mengelola pariwisata yang ada di suatu daerah. Secara spesifik adalah memberdayakan masyarakat untuk bersama mengembangkan pariwisata yang ada di daerah. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh para ahli, maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mencakup pendorong bagi masyarakat local agar senantiasa mendukung perkembangan pariwisata di wilayahnya (motivator), penyediaan fasilitas pendukung pariwisata (fasilitator), kerjasama yang sinergis dengan berbagai stakeholder pariwisata (dinamisor).

Adapun peran dinas pariwisata sebagai motivator, sebagai dinamisor, fasilitator, dan implementor dapat dijabarkan dan rinci kedalam beberapa kategori antara lain yaitu :

a. Ketersediaan Anggaran

Pemerintah Kabupaten Bantul memerlukan dukungan finansial dalam menyelenggarakan perannya sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan lembaga, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Peran strategis anggaran daerah Kabupaten Bantul semakin menonjol karena dia merupakan alat untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran di masa mendatang, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, menetapkan otorisasi pengeluaran di masa mendatang, sebagai sarana pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kerja, alat motivasi pegawai, serta alat koordinasi bagi seluruh aktivitas berbagai unit kerja dalam birokrasi pemerintah. Maka prinsip pokok yang menekankan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah pada kepentingan publik menjadi isu penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

Suharyanto dalam (Kumorotomo, 2005:4) menyatakan beberapa alasan pentingnya anggaran, antara lain:

- 1) Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Anggaran diperlukan karena adanya tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang sedangkan ketersediaan sumber daya sangat terbatas, anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, pilihan dan trade off.
- 3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas.

Berkaitan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, ketersediaan anggaran sangat penting, karena anggaran merupakan sector yang krusial bagi pemerintah. Oleh karena itu dalam pengelolaan anggaran penting menerapkan beberapa prinsip terkait dengan good governance, antara lain:

a) Transparansi

Transparansi dalam istilah politik merupakan keterbukaan. Yang dimaksud keterbukaan dalam hal ini adalah keterbukaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah Kabupaten Bantul kepada masyarakat dan khalayak umum. Maksud dari transparansi adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap masyarakat.

b) Akuntabilitas

Dalam istilah yang ada akuntabilitas sering diartikan yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility, yang dapat dipertanyakan (answerability). Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan. Secara teknis adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan dan melaporkan sesuatu yang sudah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban.

c) Value For money

Implementasi anggaran yang menerapkan prinsip dapat memberikan manfaat; efektivitas pelayanan publik yang tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan publik, penghematan biaya pelayanan karena berkurangnya inefisiensi dan penghematan sumber daya, alokasi pembiayaan berorientasi pada kepentingan publik dan meningkatkan kesadaran penghargaan terhadap publik. Anggaran diperuntukkan untuk tersediannya sarana, prasarana dan operasional implementor, untuk mewujudkan realisasi dari kebijakan. Pelaksanaan anggaran keuangan (financial) akan ditentukan oleh kualitas implementor dalam pengelolaannya. Dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan ketersediaan anggaran adalah tersediannya alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism).

d) Ketersediaan sarana dan prasarana

Kesuksesan dan kelangsungan hidup organisasi dalam menyiasati pengaruh lingkungan sangat tergantung pada kapasitas dalam merencanakan, menggali, menggerakkan, dan mengelola sumber daya manusia maupun mengelola sarana dan prasarana yang dimiliki. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan modal pemerintah untuk merealisasikan suatu program. Sarana dan prasarana yang memadai lebih memudahkan pemerintah untuk mengimplementasikan program yang sudah direncanakan.

Selain itu sarana dan prasarana juga bisa menjadi optimal atau tidaknya pemerintah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bantul harus menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang telah ada, bahkan memperbaharui apabila sarana dan prasarana tersebut sudah tidak layak untuk digunakan. Ketersediaan sarana dan prasarana adalah kepemilikan aset yang menunjang kegiatan untuk mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism).

e) Kemitraan (Partnership)

Prinsip good governance yang telah disebutkan sebelumnya merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara

pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta merupakan suatu langkah yang biasa dilakukan dalam rangka menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Kemitraan (partnership) membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan kemitraan atau partnership dalam hal ini adalah kerjasama yang telah atau sedang dilakukan dengan pihak lain yang berguna untuk memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan (operasional) terbentuknya pariwisata berbasis masyarakat community based tourism.

f) Peran serta masyarakat (Participation)

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "participation" yang berarti pengambilan keputusan dan pengikutsertaan (John M. Echols Hasan Shadily 1995: 419). Peran serta masyarakat Kabupaten Bantul merupakan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk andil dalam setiap kegiatan pemerintah yang mengundang keikutsertaan masyarakat sebagai warga negara. Dalam rangka mengoptimalkan peran dari pemerintah, maka peran serta masyarakat Kabupaten Bantul perlu menjadi sorotan utama, karena masyarakat merupakan subjek dan objek dari kebijakan.

Faktor pendukung dan faktor penghambat

1) Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan strategi optimalisasi sumberdaya manusia pelaku pariwisata ini adalah:

- a. Partisipasi masyarakat sekitar obyek dan daya tarik dan sumberdaya manusia sektor pariwisata cukup tinggi, dengan partisipasi mereka dalam kegiatan bisnis pariwisata maupun kesadarannya dalam turut serta menjaga kelestarian aset wisata yang ada.
- b. Adanya dukungan dari Instansi terkait. Misalnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selaku dinas yang diberi wewenang oleh Bupati Bantul untuk mengembangkan pariwisata Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengadakan Diklat Cenderamata bagi para pedagang cenderamata.
- c. Adanya RIPARDA Otonomi Daerah yang secara langsung berimbas terhadap kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengembangkan dan membangun segenap potensi yang sekiranya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk juga

dalam pengembangan dan pembangunan potensi pariwisata.

2) Faktor Penghambat

Selain faktor-faktor pendukung yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam pelaksanaan strategi optimalisasi sumberdaya manusia pelaku pariwisata juga mengalami hambatan, berikut adalah faktor-faktor penghambat yang dimaksudkan:

- a. Dana yang diperoleh Dinas Pariwisata untuk melakukan promosi pariwisata masih sangat kurang. Dinas Pariwisata dananya masih jauh dari harapan, masih sangat kurang, sehingga jadi promosi yang dilakukan masih sangat terbatas, paling-paling bikin brosur, leaflet gitu. Jadi belum bisa maksimal. Di Bali yang sudah maju seperti itu saja dananya besar jadi bisa bikin promosi yang maksimal, Kabupaten Bantul yang belum maju dananya cuma sedikit.
- b. Belum adanya kesamaan persepsi Kabupaten Bantul sebagai Kota Tujuan Wisata Pelestarian Promosi dan Kerjasama Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menuju tren Kota Internasional.
- c. Pemanfaatan jaringan informasi dan promosi pariwisata belum optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana yang ada, sehingga promosi yang dilakukan hanya terbatas.
- d. Jaringan kemitraan pariwisata seluruh wilayah D.I.Y dan sekitarnya belum optimal. Keadaan tersebut dikarenakan hanya sebagian kawasan lebih fokus pada kegiatan pengembangan pariwisata pada masing-masing daerahnya sehingga belum terlalu optimal.
- e. Kurang intensifnya pembinaan kelompok sadar wisata di Kabupaten Bantul.
- f. Rendahnya kunjungan wisatawan yang menyebabkan kurangnya motivasi masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul.
- g. Relatif rendahnya kepedulian pemerintah daerah dalam pengembangan SDM/aparaturnegara yang dapat merumuskan konsep-konsep pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakteristik potensi, baik potensi alam maupun budaya, yang dimiliki oleh kabupaten Bantul.
- h. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- i. Pemahaman pemerintah dan masyarakat mengenai potensi pariwisata masih rendah.
- j. Pemahaman pelaku wisata dari dunia industri atau bisnis mengenai potensi pariwisata juga masih rendah.
- k. Kepedulian pemerintah untuk mengembangkan obyek wisata masih rendah.
- l. Adanya pemahaman bahwa selama ini pariwisata belum memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah (pemerintah kabupaten).
- m. Rendahnya kepedulian pemerintah terhadap upaya meningkatkan pengalaman wisatawan

sehingga mereka tertarik untuk mengunjungi obyek yang pernah dikunjunginya atau bersedia memberikan rekomendasi dan kesan positif kepada teman-teman dan sanak keluarga mereka.

4. KESIMPULAN

Peningkatan SDM pelaku Wisata, dengan memberikan tenaga kerja yang bekerja pada Hotel Melati, Pondok Wisata, Restaurant atau Rumah Makan dan usaha jasa lainnya pelatihan, seperti pelatihan; Bimbingan Teknis Guide, Bimbingan Teknis Food Product dan Bimbingan Teknis Room Devision. Peningkatan Aparatur Pariwisata, dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan berupa; Diklat Pimpinan Tik II, Diklat Teknis Manajemen Perkantoran, Diklat Teknis Manajemen kearsipan, Diklat Teknis Pariwisata, Diklat Teknis Perizinan, Diklat Bahasa Inggris. Pemberdayaan Masyarakat, dengan memberikan Penyuluhan berupa; Penyuluhan dan Bimbingan Kelompok Sadar Wisata. Strategi Dispar Kabupaten Bantul dalam meningkatkan Kualitas SDM pelaku kepariwisataan tentunya telah berhasil dilaksanakan, melihat dampak dari upaya tersebut menyebabkan Jumlah Kunjungan Wisatawan yang meningkat setiap tahunnya.

Adapun saran yang pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran dan harapan yang nantinya dapat memberikan motivasi dan profesionalisme kerja terhadap semua pihak khususnya semua staf pada kantor Dispar Kabupaten Bantul untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas kerjanya melihat berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya di bidang kepariwisataan.

Adapun saran – saran tersebut, antara lain :

1. Bagi Dispar Kabupaten Bantul agar memberi pengalaman kerja yang lebih luas lagi untuk mahasiswa agar mendapat ilmu yang lebih banyak lagi.
2. Bagi Dispar Kabupaten Bantul untuk lebih meningkatkan lagi pengetahuan di Kawasan Wisata Kabupaten Bantul, hendaknya Dispar Kabupaten Bantul meningkatkan kebersihan dan ketertiban untuk wisatawan yang datang maupun pelaku wisata yang ada di daerah tersebut dengan cara memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak menjaga kebersihan dan ketertiban.
3. Bagi pihak akademik agar lebih meningkatkan pelatihan bagi mahasiswa dan memperluas jaringan kerja sama tenaga trained tenaga kerja.

5. REFERENSI

- Ariani, D. W. (2003). *Manajemen Kualitas: Pendekatan Sisi Kualitatif, Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi*. Depdiknas.
- Anindita, M. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kunjungan ke Kolam*

- Renang Boja*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- A.A. Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), hal. 56
- Bacal, R., *Evaluasi Kinerja Sektor Publik*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hal. 47
- Buku “*Diklat Teknis Tingkat Dasar (Bidang Pariwisata; Drs. Sukowinarto, M.SI; 2001; 2)*”
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE
- Dewi Hanggraeni, *Manajemen Sumber daya Manusia*, (Jakarta: LPFEUI, 2012), hal. 35
- Ekbis.sindonews.com, 2016. *Tiga Langkah Prioritas Pemerintah Dongkrak Iklim Pariwisata RI* (<https://ekbis.sindonews.com/read/1106396/34/tiga-langkah-prioritas-pemerintah-dongkrak-iklim-pariwisata-ri-1462436976>) (diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 pukul 07.07 WIB)
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasinya*. Alfabeta Bandung.
- Fandy, Tjiptono. 2004. *Manajemen Jasa, Edisi Pertama*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Jones, J. J., dan Walters, D. L. *Human Resource Management in Education (Manajemen SDM dalam Pendidikan)*, (Yogyakarta: Q-Media, 2009), hal. 41
- Kementerian Ekonomi dan Pariwisata Republik Indonesia. 2012. *Undang-undang No 10 Tahun 2009*. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IV/MPR/1978 *Tentang Garis-Garis Haluan Negara*
- Lukman, Dendawijaya. 2000. *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia : Jakarta .
- Martiani Husaeni. 1995. *Penyusunan Strategi Pelayanan Prima dalam Suatu Perspektif Reengineering dalam Bisnis dan Birokrasi*, Jakarta: Erlangga.
- Malayu Hasibuan.S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal.7
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara Jakarta.
- Pitana, I Gede dan Diarta, I Ketut Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Pontoh, Otniel. 2010. *Identifikasi dan Analisis Modal Sosial Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis. Volume VI-3. Manado: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas SamRatulangi
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Saefullah, 1999. *Konsep dan Metode Pelayanan Umum yang Baik, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Sumedang: Fisip UNPAD.
- Sedarmayanti, 2004. *Membangun Dan Mengembangkan Kebudayaan Dan Industri Pariwisata*. Penerbit Refika Aditama
- Sukirno, Sadono, 2006. *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Kencana.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 172
- Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE, 1992), hal. 02
- Siagian, S. P, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal.183
- Tjiptono, Fandy dan Anastasia Diana. 2003. *Total Quality Manajemen. Edisi Revisi*. Andy: Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
- Umar, *Riset Sumber Daya Manusia dan Administrasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 24
- W.J.S, Poerwadarminta (1991), Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wahid, Abdul. 2015. *Strategi Pengembangan Wisata Nusa Tenggara Barat Menuju Destinasi Utama Wisata Islami*. Skripsi.
- Wahab, Salah. 2003. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: PT Perca
- Wardiyanto, 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Penerbit Andi. Yogyakarta, Hal 38.
- Yoeti, Oka A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta